

Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia

Munadi

Ilmu Politik – Universitas Sains Al-Qur'an

amunadi11@yahoo.com

Abstract

Democracy allows the people to have equal rights in decision-making that can change their lives. Consequently, opposition and coalition exist in this political system. While the opposition aims to correct and evaluate various government decisions, the coalition is the power holder or supporter of the government. Because Indonesia is a country that uphold legal formal consisting of many political parties, a coalition government party must be formed. This is done by gathering other parties until the government can run effectively so that it has the basis of a combination and effective legitimacy. In the second period of President Susilo Bambang Yudhoyono's cabinet, the emergence of political parties that were powerless and did not dare to become the government's opposition became evidence of the need for democratization. The emergence of elitism, centralization, and anti-public, as well as the freezing of political structures and the backwardness of the cultural attitudes of the Indonesian people caused the opposition to stand on the word of democratization. Therefore coalitions and opposition are two important parts in building a democratic governance system in Indonesia. This article underlines that democracy in the political elite tends to produce a pseudo and half-hearted democracy. Therefore, the portrait of democratization is needed as a reinforcement of all elements of civil society and thus is not seen as a "devout movement of the state", but an urgent movement to change the attitude of the state through changes in the political composition within it.

Keywords: *opposition, coalition, Indonesia, political culture, democracy*

Abstrak

Demokrasi memungkinkan rakyat untuk memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Akibatnya, oposisi dan koalisi eksis dalam sistem politik ini. Jika oposisi bertujuan untuk memperbaiki dan mengevaluasi berbagai keputusan pemerintah, koalisi adalah pemegang kekuasaan atau pendukung pemerintah. Karena Indonesia adalah negara yang menjunjung formal hukum yang terdiri dari banyak partai politik, partai pemerintah koalisi harus dibentuk. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan pihak lain hingga

pemerintah dapat berjalan secara efektif sehingga memiliki dasar kombinasi dan legitimasi yang efektif. Pada periode kedua kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, munculnya partai-partai politik yang tidak berdaya dan tidak berani menjadi oposisi pemerintah menjadi bukti perlunya demokratisasi. Munculnya elitisme, sentralisasi, dan anti-publik, serta pembekuan struktur politik dan keterbelakangan sikap budaya orang Indonesia menyebabkan oposisi untuk berdiri di atas kata demokratisasi. Karena itu koalisi dan oposisi adalah dua bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi bahwa demokrasi di elit politik cenderung menghasilkan demokrasi semu dan setengah hati. Oleh karena itu, potret demokratisasi diperlukan sebagai penguat dari semua elemen masyarakat sipil dan dengan demikian tidak dilihat sebagai "gerakan taat pada negara", tetapi gerakan mendesak untuk mengubah sikap Negara.

Kata Kunci: *oposisi, koalisi, Indonesia, kultur politik, demokrasi*

Pendahuluan

Sebuah demokrasi yang sempurna keberadaannya memerlukan usaha yang dilakukan secara berkala dan continue. Tahapan tersebut seharusnya mengikuti tahapan-tahapan tertentu hingga sebuah demokrasi menjadi sebuah kesadaran kolektif bagi semua kalangan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Demokrasi selalu akan muncul pilihan antara oposisi dan koalisi dan fenomena ini mengharapakan pemerintah kuat dan demokratis. Ada dua pilihan ini adalah agar supaya pelaku demokratis tidak harus selalu mendukung kebijakan pemerintah. Oposisi mempunyai misi mengawasi, mengontrol bahkan bisa mengkritik, sama pentingnya untuk mewujudkan penegakan demokrasi. Hingga tujuan utama itulah munculnya kata oposisi ini dan ini sangat penting untuk mendemokrasikan kultur budaya kritik terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun kenyataan politik beberapa elite partai lebih mengedepankan koalisi dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk duduk di mengisi kabinet daripada menjadi bagian dari partai oposisi. Alasan mereka takut mungkin nanti tidak akan kebagian kue pembangunan. Harapan dan fungsi oposisi adalah sebagai pengawas akan selalu menjaga pemerintah agar pemerintah atau penguasa berjalan di rel yang tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang serta sesuai dengan ketentuan system etika politik di Indonesia.

Oposisi dalam realita belum tentu bisa terbentuk dalam sistem perpolitikan di Indonesia tapi lebih mengedepankan cara-cara kekeluargaan dan gotong royong serta memberi tempat kepada beberapa partai politik, berarti semua mendapat sedikit-sedikit. Arus baliknya ada pendapat bahwa upaya partai politik menginginkan dan

mendapatkan diri sebagai oposisi untuk membangun tradisi baru demokrasi. Kehadiran dan terbentuknya oposisi memunculkan inisiatif pemerintah harus selalu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang menjadi tujuannya. Berjalannya proses demokrasi mekanisme umpan balik akan berjalan apabila pemerintah yang berkuasa diimbangi munculnya beberapa jenis kuasa oposisi. Potret pihak oposisi yang bertekad mengambil peran oposisi harus siap menerima segala resiko dan menjadi oposisi yang loyal, kritis sikap tetap dikedepankan, namun bukan provokator yang membahayakan eksistensi bangsa. Percepatan yang luar biasa dalam hal sosial politik mengalami dinamika kehidupan dalam pemerintahan negara. Hal ini dapat dilihat melalui meningkatnya gerakan sosial, partai-partai yang sebelumnya terbatas untuk politik pertumbuhan mereka, dan pembangunan kebebasan politik untuk melaksanakan kritik dari masyarakat simpatik.

Tahun yang sangat penting dalam transisi demokrasi yaitu pada tahun 1998 serta tahun ini termasuk tahun substansial di Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam gelombang global demokrasi dan tahun ini merupakan periode yang membuka kemungkinan bagi Indonesia, menurut buku Samuel Huntington, *the Third Wave*, yang masih merupakan polemik perdebatan politik. Optimisme memang diperlukan. Tapi kita juga tidak harus terjebak oleh perkembangan dramatis yang terjadi di Indonesia setelah kematian politisi. ini belum bisa dipastikan sebagai tahap awal demokrasi. Lebih terlihat dalam konteks ini ketidakpastian lebih lanjut Apakah Indonesia sedang menuju sistem demokratis baru atau hanya diselingi dalam jangka waktu yang relatif pendek oleh musim semi kebebasan, yang kemudian kembali ke rujuk dengan gaya baru otorisme. Meminjam editor O'donnel, Indonesia masih mengalami fase transisi demokrasi. Pada sisi lain dalam era transisi kearah demokratisasi elite yang berkuasa harus memiliki legitimasi yang kuat dan mendapat dukungan yang kuat dari segala lapisan masyarakat. Untuk itu perlu membangun koalisi politik yang kuat dan dukungan yang memadai seseorang pemimpin tidak akan sanggup bekerja secara efektif.

Pengertian dan Hakikat Oposisi Politik

Kata oposisi berarti “berlawanan” asal kata dari Inggris lahirnya kata oposisi ini dan tumbuh pertama kali, ketika dalam parlemen terdapat dua pihak yang saling berhadapan. Partai yang menang dalam pemilu bertindak sebagai pemegang kekuasaan, sebaliknya partai yang kalah bertindak sebagai oposisi, diluar kekuasaan bertugas mengontrol kekuasaan dan memberi alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa sehingga rakyat mempunyai pilihan kebijakan. Oposisi bisa berupa kata-

kata, tindakan, dan bentuk masukan lainnya yang meluruskan dan mendorong segala sesuatu yang berada di jalan yang sesuai. Mengkritisi dan mengawal arah kebijakan pemerintah agar berjalan pada rel yang sesuai dengan undang-undang adalah merupakan hakikat oposisi sebenarnya. Elite-elite politik sekarang ini sering disalahartikan sehingga mereka memaknai oposisi sebagai sikap untuk menentang atau meneghal kebijakan pemerintah. Menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Hariyadi, ini adalah pengertian yang keliru.

Pemerintahan presidensial wacana politik oposisi ada perbedaan pandangan dalam kaitannya dalam system demokrasi. Oposisi tetap dapat tumbuh di Negara yang menganut paham persidensial, sebab peran itu dapat dilakukan oleh legislatif. Sementara ada yang berpendapat bahwa Negara yang mengandung sistem presidensial maka oposisi tidak dapat tumbuh, karena pemerintahan hampir semua di dominasi dan terakomodasi partai, sementara fungsi pengontrol berada pada tangan DPR. Sehingga partai oposisi tidak bisa menjatuhkan DPR. Pada hal fungsi partai oposisi bertujuan menjatuhkan pemerintah dan menggantikannya. Jadi Oposisi tidak hanya sekedar merencanakan dan di bentuk untuk menkritik terhadap pemerintah yang diperankan oleh partai-partai politik di luar pemerintahan akan tetapi oposisi mempunyai tugas sebagai kelompok kekuatan yang ingin mengontrol dan mengoreksi, mengevaluasi suatu kebijakan pemerintah. Perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara merupakan satu bentuk aktualisasi dari oposisi sebagai salah satunya.

Keberadaan demokrasi harus dibangun pada dasarnya. Ini jelas bahwa demokrasi sedang diuji lagi di Indonesia, yang jelas selama pemilu langsung pada tahun 2009, sebuah periode politik yang kompleks yang muncul partai-partai politik yang kalah dalam pemilihan. Sehingga partai-partai politik tidak berani dan bahkan tampak kurang yakin untuk posisi diri mereka sebagai oposisi dalam pemerintahan. Partai politik yang bisa dikatakan sebagai partai besar contohnya Partai PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya secara nyata menginginkan untuk bersatu dan berjanji berkoalisi dengan pemerintah yang menang dan sedang berkuasa pada waktu itu yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya yaitu Bapak Wakil Presiden Boediono. Dengan demikian, pemenang, yaitu pilihan presiden Partai Demokrat dan Pemilu Legislatif 2009 dengan suara dalam dua pemilu, lebih dari 60% secara otomatis menjadi partai yang memerlukan koalisi. Posisi dan peran utama diduduki oleh Partai PDI-P dan pada saat itu Taufiq Kiemas adalah ketua MPR, sehingga ada sejumlah kursi Menteri ke manajemen dan pejabat PDI Perjuangan. Selain itu, kursi menteri akan didistribusikan ke beberapa partai besar seperti Partai Golongan Karya termasuk memegang kepemimpinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikonfirmasi dengan pernyataan dalam pidato pertamanya untuk memenangkan pemilihan presiden 2009 menyatakan, "kompetisi politik berakhir ketika kita bersatu". Pendapat pertamanya adalah inti dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun pemerintahan baru yang rentan dari 2009-2014 dan secara damai dengan semua elemen elit politik walaupun ada beberapa partai politik seperti Hanura dan Gerindra yang terlibat dalam berposisi. Namun, Presiden Susbang Yudilo berjuang bersama-sama dengan dukungan dan memimpin pemerintahan yang berlangsung selama ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dipromosikan dari partai demokratis sehingga partai politik lainnya yang merupakan rival di kontestan legislatif adalah Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk bekerja sama dan memimpin negara untuk lima tahun ke depan. Penerapan besar dari Pemilu tahun 2009 yang diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah salah satu dari pemilu yang miskin setelah reformasi tersebut, karena banyak politisi dan sosiolog berpendapat bahwa pemilu umum 2009 dapat dilakukan dengan tanpa memproduksi kekerasan fisik dan separatis karena ini adalah pertama kalinya pemilihan presiden terpilih secara langsung termasuk pemilihan presiden.

Pemilu 2009 memang sudah berakhir. Namun, pemilihan ini tidak menghasilkan sistem politik yang benar-benar demokratis dan hasil yang diinginkan. Tapi implementasi demokrasi di Indonesia masih sebuah miniatur demokrasi terbatas pada pemilu, formal dan demokrasi di Indonesia. Ketika Schumpeter melihatnya, demokrasi ini terlihat tidak memuaskan oleh beberapa ilmuwan politik dan aktivis pro-demokrasi. Demokrasi terwujud dalam bahasa Indonesia dalam hal pemilihan hanya melayani penguasa, dan lebih tidak mampu memproduksi kebijakan umum bagi masyarakat yang lebih luas yang relevan, sehingga gagal memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan menjamin kebutuhan politik, yang merupakan fitur demokrasi yang sempurna.

Oposisi di dalam sebuah demokrasi di Indonesia merupakan ciri demokrasi yang mati jika tanpa adanya program yang jelas. Padahal, demokrasi di sebuah Negara yang modern membutuhkan kontrol dan umpan balik kroscek yang bersifat sistem politik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya sebagian partai besar pemenang pemilu berkoalisi, Dewan Perwakilan Rakyat hanya akan menjadi tukang ketuk palu (*rubber stamp*) dan mau menuruti kehendak pemerintah jika tidak ada partai oposisi di dalamnya. Sementara beberapa kepentingan publik ditekan oleh negara dengan semua kebijakan tersebut diabaikan oleh elit politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian hal-hal akan muncul yang mengatakan bahwa suara rakyat sebagai suara

Tuhan atau "*vox populi vox dei*" akan berubah menjadi suara elit sebagai suara Allah atau "*vox elite vox dei*". Peristiwa seperti itu adalah bahwa pemerintah ini hanya mengulang era pemerintahan Suharto dengan situasi yang berbeda. Hal ini karena persepsi politisi yang terlibat dalam cabang kekuasaan memberikan lebih banyak berkat dalam bentuk akses ke sumber daya daripada oposisi. Ini menunjukkan bahwa oposisi dengan akses yang tersumbat ke sumber daya ekonomi, baik mereka yang di sektor swasta dan melalui kontrol posisi publik.

Orde baru telah berlaku selama 32 tahun, dimulai dari tahun 1967 sampai 1998. Politisi terlarut dalam kehidupan baru dan modern sistem politik yang tidak tahu oposisi, sehingga membuat partai tidak canggung dan tidak nyaman dalam posisi untuk membangun budaya dan tradisi politik. dan sulit untuk membedakan dari pihak berwenang, baik di artikulasi nyata dan operasional konsep yang ditawarkan. Jadi jika hal ini terjadi, maka pemerintah, yang ditunjuk oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan memiliki partai oposisi yang akan muncul selamanya, baik di pemerintahan dan di parlemen. Seperti sebuah gambar menunjukkan bahwa inkonsistensi Partai Demokrasi Indonesia sebagai partai terpilih yang tidak dapat memenangkan pemilu 2009, sehingga dalam mempertahankan sikap politiknya sebagai partai oposisi seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya 2004-2009.

Pemerintah yang terpilih memiliki potensi sulit untuk dikondisikan dan mudah disalahgunakan jika semua kekuatan politik dihipnotis dan silau untuk masuk ke dalamnya ketika pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoy dan Wakil Presiden Boedono adalah sama. Tidak adanya mereka yang tiba-tiba ingin menjadi oposisi di pemerintah juga menunjukkan bahwa tujuan utama dari elit politik Indonesia hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Memang demokrasi membutuhkan keberadaan kontrol dan ini diharapkan dari mereka yang kalah dalam pemilihan. Untuk alasan ini, mereka harus berada di luar kekuasaan dan sikap untuk menunjukkan konsistensi sikap oposisi. Hal ini tidak logis dalam demokrasi jika semua pihak akhirnya bersatu dalam pemerintahan.

Politik praktis menggambarkan ini sebagai sah, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan cenderung mengalami korupsi dan penindasan, dan kekuasaan sewenang-wenang pasti akan muncul untuk menindas dan semakin korup. Itulah sebabnya dalam teori, kelahiran pemerintahan yang kuat harus seimbang dengan kekuatan oposisi yang kuat. Dengan tidak adanya itu, bukan pemerintah yang kuat lahir, tapi pemerintah otoriter dan korup. Oleh karena itu, keterbatasan kekuasaan politik menjadi sangat diperlukan.

Dalam era reformasi yang kuat muncul tetapi tidak segera melahirkan pemerintahan yang kuat, ini berarti bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah merasakan keseimbangan yang ideal sistem politik sehingga budaya dan tradisi tradisional untuk menjadi oposisi kepada para penguasa politik tidak pernah benar-benar tumbuh di negara kita Republik Indonesia. Keberadaan pihak oposisi di Indonesia semata-mata tertuju pada oportunistis dan tujuannya hanyalah kekuatan.

Secara teoritis itu tidak salah jika partai politik bertujuan untuk memenangkan oportunistis dan kekuasaan, tapi apa yang perlu disadari adalah bahwa masalahnya adalah ketika partai sering tidak siap untuk berdiri di posisi dan berdiri di posisi oposisi Partai. Karena beberapa pihak oposisi merasa tidak nyaman dan takut dengan posisi oposisi. Alasan sebenarnya bahwa setelah mencapai kekuasaan harus dibagi di antara partai-partai coalition tetapi tidak dalam kelompok oposisi. Jadi kesempatan untuk lebih ekonomis menguntungkan bagi partai lebih mungkin dirasakan dan dibagi oleh kelompok koalisi.

Jadi, jika tidak ada pihak oposisi di pemerintahan masih banyak langkah yang dapat diambil oleh pesaing politik lainnya untuk memberikan kontrol dan pengawasan kepada pemerintah, sehingga pemerintah SBY-Boedic bukanlah seperti yang dikatakan Lord Acton, sehingga demokrasi ideal di Indonesia dapat terwujud. Sementara itu, menurut Sunny Tanuwidjaja, benchmark utama untuk pengawasan pemerintah dan memberikan impetus kendali tidak hanya melalui oposisi, tetapi dalam konteks Republik Indonesia, sangat berisiko dan tidak kondusif jika sebuah partai licks menjadi oposisi, akhirnya tujuan dapat direalisasikan dalam koalisi, jika pemerintah serius membangun sebuah pemerintahan, sementara demokrasi di Indonesia.

Menciptakan oposisi adalah pembentukan Negara Indonesia mengambil sistem politik demokrasi. (Sesungguhnya ini) yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan urusan yang besar). (1) dalam 40 tahun terakhir, Indonesia politik telah mengalami penghapusan tradisi oposisi. Memulai sesuatu yang sudah lama tidak berada di sana ... secara alami akan memprovokasi kebingungan dan gagap. (2) masih ada kecenderungan untuk berbagai lingkaran politik untuk lebih memilih untuk berurusan dengan titik melanggar, daripada membangun titik pertemuan. (3) berbagai kelompok di Indonesia, partai-partai politik, siswa saat ini tampaknya mengalami disorientasi, terutama dalam kerangka pilihan antara konsisten mempromosikan demokrasi dan berkontribusi terhadap kembalinya otoriterian dengan cara yang tidak sengaja. (4) kepercayaan Surplus masih merupakan tren umum di mana-mana. (5) banyak lingkaran politik tampaknya telah salah menilai reformasi. Mereka berpikir bahwa reformasi adalah suatu proses yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, meskipun

reformasi membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan konsistensi. (Saefullah, 1999).

Sikap menentang atau melawan pemerinatah bukan merupakan upaya melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dengan pemerintah Pada hakikatnya ini bukan makna oposisi atau artinya bukan sebagai sikap menentang atau melawan pemerinatah, tetapi merupakan upaya melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dengan pemerintah. Oleh karena itu adanya partai oposisi yang bertindak sebagai oposan sangat diperlukan karena harus punya perbedaan. Menciptakan demokrasi di Indonesia gabungan dari partai oposisi yang kuat tidak akan menciptakan dis stabilitas karena punya satu tujuan. Masyarakat akan menggunakan haknya untuk melaksanakan kontrol dan etika politik pada pemerintah. Pada gilirannya bila ada keseimbangan antara pemerintah dan oposisi maka akan tercipta kader negarawan yang mampu mengekspresikan, yang tidak dibatasi kepentingan kelompok, punya integritas yang tinggi demi visi dan misi masa depan bangsa. Keberadaan oposisi merupakan bagian dari tatanan politik yang diperlukan untuk mengembangkan pikiran-pikiran alternative serta control terhadap pemerintah sehingga dapat menegakkan sistem demokrasi.

Realita runtuhnya bangunan politik orde baru telah memunculkan kembali oposisi dalam realita perpolitikan di Indonesia. Fakta ini diduga dari sisa-sisa kekuatan lama juga berguna untuk melembagakan oposisi secara formal dalam sistem politik NKRI. Perkembangan partai oposisi sebagai sebuah control, tetapi melainkan merupakan proses evolusi dan perubahan di Eropa Barat dan Amerika Serikat sejak abad 19.

Dengan adanya oposisi sebagai gerakan secara massif antar partai politik dapat mengontrol pemerintah, sehingga pemerintah mengalami empat fase yaitu: *pertama*, fase opoaiai yang hanya bersifat seremonial sebagaimana terjadi pada masa-masa awal pertumbuhannya terutama di Negara Eropa. *Kedua*, fase oposisi *Destruktif-oportunis*. Dalam partai oportunis ini yang tidak termasuk dalam kabinet akan menjadi oposisi dengan tugas mengendalikan pemerintah dan menawarkan konsep alternatif untuk beberapa masalah politik yang dihadapi oleh pemerintah. *Ketiga*, konsep fundamental ideologis oposisi. Dalam konsep ini oposisi tidak hanya ingin menggulingkan pemerintah dan mendapatkan kekuasaan, tetapi juga ingin mengganti sistem parlemen dan bahkan Dasar Negara. *Keempat*, tahap konseptual dari konstruktif oposisi demokratis. Ketidakpuasan publik dengan oposisi seremonial telah menyebabkan munculnya konsep oposisi radikal dalam bentuk oposisi terdistorsi dan ideologis yang memiliki karakter menghancurkan pondasi demokrasi dan memungkinkan munculnya

otoriterisasi lagi. Atas dasar konsep oposisi demokratis telah lahir. Konsep demokrasi ini menekankan keberlangsungan demokrasi dengan menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan kelompok atau kelompok. Oleh karena itu peran model oposisi tersebut sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem demokrasi (Muhammad, 1999).

Pendapat Robert A. Dahl mengatakan tentang oposisi bahwa sikap oposisi terhadap suatu pemerintahan bertujuan melihat berbagai tingkat kepaduan organisasi, sehingga mereka bisa saja terkonsentrasi dan terkonstruksi dalam satu organisasi tau terpecah dalam beberapa organisasi yang terpisah terbentuk dan bergerak secara berpisah. (Budiarjo, 2012)

Pendapat yang lain yang merupakan selaras dengan pendapat tersebut di atas adalah bahwa oposisi politik di terjemahkan adalah kekuatan politik yang singkat dan kekuatan yang singkat tersebut sesungguhnya terbentuk dari partai atau koalisi beberapa partai politik yang yang notabene bukan bagian pemerintah, kemudian mempunyai program politik alternatif berkeinginan memerintah serta dihormati pemerintah yang berkuasa sebagai unsur yang alami dalam kehidupan politik sebuah Negara. Ada juga pendapat bahwa oposisi ekstra parlementer, yang terdiri dari kekuatan yang beroposisi diluar aturan yang dibuat dlam sistem tersebut dan menggunakan cara-cara yang berbeda. Hal ini merupakan pendapat dari Voclos Havel dalam Kusumah (1999).

Kegagalan oposisi di Indonesia selama ini disebabkan tidak menjaga hukum keseimbangan dan tidak dikembangkannya budaya oposisi. Padahal sebuah oposisi merupakan kelompok yang dihormati, partai oposisi tidak akan dibebani sekandal korupsi. Peran oposisi memungkinkan pembersihan. Kelompok yang memegang kekuasaan pemerintah dan posisi oposisi sama pentingnya dan sama kuatnya. Oleh karena itu adanya oposisi yang kuat dalam sebuah tatanan parlemen sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Sebagai partai oposisi yang kalah dalam pemilihan umum di Negara yang notabene menggunakan sistem persidensial seperti di Indonesia memang tidak mengenal adanya partai oposisi, sehingga bagi partai politik bahwa sistem parlementerlah yang memberikan tempat bagi mereka bisa membentuk partai oposisi tetapi secara informal diluar parlemen sifatnya ekstra parlementer karena fungsi penekanan politik terhadap pemerintah yang berkuasa di lakukan hanya pada luar parlemen. Di Indonesia oposisi merupakan salah satu instrument politik wahana demokrasi serta aktualisasi sikap kritis terhadap pemerintah, karena menciptakan oposisi dan sikap oposisionalisme dapat mengakibatkan jatuhnya presiden.

Oposisi pada dasarnya diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintah akan tetapi di Indonesia tujuan itu belum tercapai. Konflik justru terjadi di tingkat elite kekuasaan petinggi partai pemegang oposisi dikalangan oposisi. Para petinggi partai yang menjalin jaringan dengan para oposisi partai sebagai bentuk aliansi strategis dan mengambil alternative lain para oposisi partai juga menjalin hubungan kekuasaan. Di sebuah negara maju dan sistem demokrasi partai oposisi pada umumnya akan mampu dan dapat menjalankan sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan, untuk itu semua kebijakan pemerintah akan selalu mendapat kontrol dan pengawasan dari partai oposisi kemudian bagaimana cara mengambil keputusan dan cara melaksanakan akan menjadi penyeimbang nantinya.

Kehadiran oposisi di Negara pada masa lampau di tafsirkan sebagai anti persatuan, lebih sacral lagi bahwa kehadiran oposisi bertentangan pada budaya masyarakat setempat. Akan tetapi jika tidak ada oposisi maka pemerintah yang berkuasa menjadi bersifat otoriter, tanpa peduli adanya kritik, kontrol dan serta cenderung lebih pro kepada kelompoknya, sehingga dapat ditafsirkan bahwa membungkam perbedaan pendapat, orang baru teringat pentingnya oposisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan masyarakat bukan semata-mata demi kepentingan dan legitimasi keabsahannya tetapi Negara Indonesia justru membutuhkan masyarakat untuk mendapat filter moral dan etika agar kekuasaan politik dapat berjalan sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Pengertian dan Hakikat Koalisi

Koalisi adalah kerjasama satu atau beberapa partai dan organisasi politik. Sifat koalisi bisa kerjasama dan tentu dengan sudut pandang yang simple dan ideal. Koalisi politik dapat tercipta secara utuh dan tidak bisa berubah tetapi dapat juga berubah sewaktu-waktu. Koalisi juga dapat terbentuk secara insidental serta dengan beberapa persetujuan tertentu, sehingga setelah beberapa tujuan tercapai dengan sendirinya koalisi yang terbentuk akan hilang atau pecah. Memeperoleh suara mayoritas agar bisa membentuk kabinet pada dasarnya merupakan kerjasama yang dilakukan antara beberapa partai politik koalisi sehingga bisa saja hal itu terbentuk secara bilateral atau multilateral, ini merupakan kepentingan politik sehingga rahasia atau transparan untuk memeperjuangkan kesamaan pendapat merupakan tujuan rahasia dan bersama partai/organisasi koalisi.

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pemimpin negara yaitu kondisi pada saat partai politik yang bersifat berkuasa serta mayoritas multi partai sehingga kepala

Negara harus melakukan kerjasama koalisi dengan partai-partai politik lain yang notabene perlu melakukan perpaduan kekuatan dan kekuasaan politik. Kekuatan dan kekuasaan politik pada kepala Negara berpengaruh pada pengaturan manajemen politik sebuah kepemimpinan karena lemahnya posisi pemimpin negara, filter terhadap kebijakan menjadi tersebar dikalangan beberapa koalisi partai politik sehingga tidak ada partai politik koalisi yang dapat menghambat kebijakan pemerintah.

Pemilu 1955 merupakan referensi pengalaman demokratis saja tidak menghasilkan tekat bulat satu partai yang memperoleh suara mayoritas. Sehingga pemerintah hanya bisa dibentuk berdasarkan denagan koalisi kuat dengan tujuan koalisi yang menyejahterakan seluruh partai pengusung koalisi. Jika koalisi rapuh maka pemerintah menjadi rapuh dan stabilitas sangat rendah.

Pemerintahan yang disusun berdasarkan kerjasama dengan berbagai kepentingan akan banyak menghasilkan hal positif dan tujuan politik yang diharapkan, hal ini ditegaskan bahwa jika kelompok-kelompok kepentingan politik yang merasa menjadi bagian dari sebuah pemerintahan dapat memanfaatkan secara optimal aspirasi politiknya lewat orang-orang yang duduk dalam kekuasaan, maka mereka telah mempunyai akses yang nyata tepat terhadap kekuasaan eksekutif, sedang kelemahannya dapat melunakkan fungsi oposisi mengingat kabinet merupakan kompromi politik dari aneka ragam partai politik maka formasi kabinet mengandung banyak kelemahan sulit mengembangkan kerjasama yang kompak karena ada loyalitas ganda yaitu loyal terhadap presiden dan loyal terhadap kepada partai politiknya.

Koalisi merupakan proses pengambilan keputusan dan kinerja cabinet yang tepat dalam sebuah kepemimpinan Negara jika di barengi dengann realitas kerjasama politik dengan motivasi mendudukan beberapa orang pendidri elite partai politik untuk duduk di kabinet sehingga anggota kabinet dikuasai oleh orang-orang yang kurang pandai dan kualitas yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara signifikan dalam pemilu, ketidaksetujuan terhadap kerjasama politik dapat menjadikan presiden dan jajaran eksekutif semakin sibuk meneladani tantangan anggota dewan. Sehngga akibat hal tersebut tugas eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan serta pembangunan pada masyarakat menjadi terbengkelai.

Pemerintahan semakin tidak efektif ditunjukkan pada realitas sosial kehidupan masyarakat apabila diamati secara jelas yaitu dengan ketidak kemampuan pemerintah memberi perlindungan, rasa aman, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu kepala Negara dengan kekuasaan formal dan simbolik harus bisa cukup besar dapat mempengaruhi pembentukan koalisi yang mampu menjadi poros politik untuk mendukung pemerintahan.

Pendapat dari pakar politik mengatakan bahwa agar pemerintah kuat perlu membentuk koalisi: (1) partai yang mendominasi eksekutif (pemerintah dan kabinet) harus juga mendominasi legislatif idealnya hanya ada satu partai yang mendominasi baik eksekutif maupun legislatif; (2) pemerintah yang ada haruslah pemerintah koalisi antar partai, yang total koalisi itu melebihi lima puluh persen parlemen; (3) koalisi itu tidak diserahkan secara bebas kepada negosiasi dan inisiatif partai ini akan bisa menyebabkan kelebihan dan ketidakadilan politik karena partai yang menang pemilu dapat saja tersingkir karena kurang pandai meloby atau dijadikan musuh bersama. Konstitusi harus mengatur koalisi itu secara bertingkat dan aturan itu menjadi the rule of the game (Denny, 2001).

Demokrasi Antara Oposisi dan Koalisi

Tatanan sebuah pemerintahan yang dapat menentukan kebijakan yang baik tentu membutuhkan oposisi. Karena Negara Indonesia mempunyai tujuan yang akan diwujudkan. Sehingga oposisi merupakan bagian penting dari sistem politik yang harapannya diperlukan untuk mengembangkan berbagai pikiran alternatif, melakukan evaluasi dan filter serta memberikan masukan tentang kebijakan pemerintah dalam membangun system demokrasi.

Demokrasi yang dikehendaki dan diinginkan ternyata bisa semu dan tanpa arah karena lantaran kebebasan bertindak dan berpendapat hanya dimonopoli penguasa (Zainuddin, 2001). Sehingga sejarah orde baru seharusnya menjadi pengalaman berharga betapa sebuah kekuasaan yang absolute dan tanpa adanya masukan dari berbagai elemen menjadikan pemerintahan tersebut kropos dan lemah.

Keberadaan dan adanya oposisi adalah munculnya kebijakan politik di era reformasi sehingga ini merupakan modal untuk melembagakan dan membangun kekuatan oposisi di Negara ini. Agar tercapai tujuan oposisi ditentukan oleh kemampuan beberapa partai politik pengusung oposisi. Ini terlihat ketika tercapainya sebuah tujuan oposisi sangat ditentukan oleh kekuatan oposisi dalam melaksanakan peran melihat dan mengevaluasi kondisi sosial yang terjadi. Kegiatan melihat, mengevaluasi pemerintah seharusnya oposisi juga diharapkan mengevaluasi langkah politik pemerintahan dengan parameter peraturan tatanan sebuah perundang-undangan yang jelas di perlakukan. Sementara dari kultur budaya timur yang mengusung cenderung feodal dan pathernalis dapat menghambat berkembangnya kekuatan oposisi. Sehingga tataran operasional munculnya usulan perlunya peningkatan pembangunan oposisi loyal pantas dipertimbangkan. Minimal telah

menyediakan ruang dialog antara beberapa masyarakat dan penguasa hingga dapat terwujud apa yang akan diarah sebagai tujuan.

Sistem demokrasi seharusnya di tinggalkan sistem oposisi destruktif oportunistik, karena oposisi semacam ini akan membuat pemerintah jatuh bangun dalam membangun sebuah negara. (Zainuddin, 2001). Oleh karena itu dalam demokrasi yang sehat perlu dikembangkan adanya oposisi konstruktif demokratis. DPR dapat melaksanakan tugas mengendalikan semua kebijakan pemerintah ketat sesuai dengan hukum yang dapat diterapkan, etika politik, efisiensi dan rasionalitas standar. Selain itu, DPR juga diharapkan untuk mengembangkan alternatif, konsep politik visioner sehingga proses penyegaran terus berlanjut.

Budaya oposisi pada masyarakat Indonesia belum familier jadi masyarakat Indonesia masih melihat dan mengartikan bahwa budaya oposisi sebagai pembangkangan sistem politik tidak ada penanaman konten kekuatan oposisi di masyarakat Indonesia. Pemerintah dibentuk berdasarkan kompromi dan oposisi terhadap pemerintah kemungkinan peran Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya pro dengan kehendak rakyat bisa saja terkontaminasi dengan keinginan oposisi atau partai oposan saja. Sehingga oposisi akan mengandalkan kepada kebebasan berpikir intelektual, pers, dan atau gerakan mahasiswa. Tindakan seperti kompromi ini dapat mengakibatkan mengurangi sikap kritis Dewan Perwakilan Rakyat untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa. Pemikiran kritis akan diciptakan oleh media sehingga ini dapat memberi peluang publik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kritik tajam terhadap pemerintah Indonesia. Dalam memelihara keseimbangan dan terus melakukan proses demokrasi kompromi jangan sampai menghilangkan kebebasan pers. Kebebasan pers ini yang akan menampilkan *public opini*. Pers yang bebas dapat bertindak sebagai oposisi untuk mengawasi pemerintah. Iklim demokrasi semacam ini yang sarat terjadi apabila ada keseimbangan antara kekuatan oposisi dan kekuatan pembentukan pemerintah.

Untuk mengontrol Negara agar pemerintah tidak menyalah gunakan kekuasaan Oleh karena itu eksistensi oposisi sebagai suatu keniscayaan karena ini dapat berfungsi justru dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan Negara agar tidak keluar dari koridor demokrasi ini menjadi tugas dari oposan. Kemudian untuk mengevaluasi dan mengkritik dan kesediaan untuk dikoreksi dan dikritik merupakan kunci system demokrasi. Oposisi ini merupakan soko guru bagi system demokrasi namun dalam pelaksanaan oposisi juga diharapkan melaksanakan moral dan etika politik dengan benar, agar oposisi tidak sekedar ingin berbeda dan menentang kekuasaan. Oposisi tetap loyal pada bangsa dan Negara.

Kontrol sosial ide dasar dari sistem demokrasi adalah berlakunya control sosial yang efektif. Pemerintah demokrasi memiliki kebebasan dan menerima adanya kritik, terbuka dan transparan. Peran oposisi dipandang sah-sah saja untuk menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah. Di Indonesia ada tiga pilar oposisi yang potensial sepanjang sejarah demokrasi selalu hidup serta memainkan fungsinya secara efektif yaitu pers, mahasiswa dan lembaga sosial masyarakat.

Pertama fungsi pers cenderung memberukan telaah kritis terhadap penguasa. Ini terlihat dalam sebuah Negara yang umum menganut asas demokrasi sehingga dengan hadirnya kebebasan pers memungkinkan pers lebih netral dalam mengabarkan berita yang berkaitan dengan pemerintah atau elite partai sehingga berita lebih dapat menjelaskan secara *independence*.

Pers memang tugasnya memberikan informasi, tetapi juga pers bisa memberikan kritik. Karena pers adalah napas demokrasi itu sendiri. Dalam Siregar (2003: xxxiv) Kontribusi pers sangat besar bagi upaya di dalam memperjuangkan dan menjelaskan demokratisasi bagi masyarakat. Pers bisa saja selalu masuk dalam ranah publik dengan bisnis atau ekonomi sebagai nilai kultural yang ditempuh dengan cara memberdayakan warga melalui otonom atau independen. Point kedua yang merupakan pilar oposisi adalah gerakan mahasiswa memiliki keikhlasan berpolitik ini tendensi dan motif untuk mendapatkan kekuasaan, gerakan mahasiswa ini lebih banyak memberikan hasil di bandingkan dengan elemen oposisi liannya. Pilar oposisi yang bersifat ekstra parlemen adalah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat maka banyak masyarakat dapat menyalurkan berbagai gagasan kritis secara langsung untuk melakukan fungsi evaluasi dan filter terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. Point ketiga yang merupakan pilar oposisi adalah kekuatan Lembaga Swadaya Masyarakat cukup praktis dalam menumbuhkan sistem demokrasi dan menegakkan pemerintah Indonesia. Tugas melakukan advokasi bagi rakyat serta melakukan tekanan kepada pemerintah adalah salah satu tugas Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga tidak hanya melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan kebijakan lainnya yang menyangkut masyarakat luas. Ketiga point pilar oposisi ini saling menyempurnakan. Aspirasi dan keinginan kelompok-kelompok masyarakat mahasiswa bisa disampaikan melalui lembaga sosial di masyarakat sehingga tidak terakomodir melalui pers.

Persoalan mendasar yang akan berpengaruh adalah kekurangjelasan kedudukan partai politik, di pemerintahan. Apakah partai politik ini menempatkan diri sebagai oposisi atau koalisi pada pemerintah. Hal ini terjadi saling mengkontrol sehingga

nantinya hanya muncul pada konteks relasi publik yang terang dan tertata antara kekuatan penyeimbang (oposisi) dan dengan kekuatan pemerintah. Kemudian manajemen siklus elite yang baik serta wajar akan dapat dibangun fondasi di atas sistem politik demokrasi yang secara formal dan terstruktur mengakui dan melaksanakan pola relasi kekuatan oposisi dan pemerintah. Jika koalisi pemerintah dipandang gagal oleh public maka lewat pemilu dilakukan pergantian pemegang kekuasaan oleh partai oposisi. Dengan demikian pengertian elit menjadi jelas dan teratur (Urbaningrum, 2004).

Demokrasi adalah kunci utama dalam politik, dalam upaya pengembangan demokrasi diperlukan oposisi adanya oposisi sebagai penyeimbangan. Dalam etika demokrasi oposisi menuntut adanya keterbukaan. Keterbukaan dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan demokrasi (Uhdin, 1998).

Koalisi akan memberikan argumentasi pada sisi pelaksanaan demokrasi, bangsa Indonesia mempunyai kultur sifat gotong royong yang bisa dilihat sangat tinggi, dengan di implementasikan dengan meredam konflik, tinggi peradaban budaya kekeluargaan yang tinggi dan berpedoman paternalistik serta lebih mengedepankan musyawarah model khas budaya Indonesia yang selama ini tumbuh subur dan bukan oposisi. Oposisi dan realitas perpaduan masyarakat adalah merupakan kultur dengan upaya tujuannya meningkatkan kerjasama. Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Aswab Mahasim (2000) bahwa kebudayaan seperti di Indonesia yang gotong royong, paternalistik, musyawarah mufakat, melahirkan bentuk demokrasi sendiri.

Sistem politik multi partai di Indonesia melalui koalisi partai politik sesudah pemilihan umum dapat dikatakan merupakan suatu keniscayaan, karena hal ini berdasarkan fakta politik yang ada di Indonesia belum ada partai politik yang mengikuti pemilu mampu memperoleh suara terbanyak. Koalisi dapat juga menjadi penyebab keseimbangan sistem politik di Indonesia karena konsekuensi Negara kita Indonesia bahwa demokrasi yang berlabel koalisi politik dapat dilakukan partai yang mayoritas menang dalam pemilu dan meraih suara terbanyak atau partai yang seideologi. Ini sama dengan yang dijalankan oleh partai politik pembentuk golongan oposisi. Berikut penjelasan dari Bambang Cipta (1999) yang mengatakan bahwa sistem politik yang notabene terdiri dari banyak partai sehingga nanti secara umum akan menghasilkan sebuah pemerintah koalisi yang diperkuat dengan adanya beberapa partai politik, karena tidak ada partai yang mampu mendapatkan paling banyak suara dalam pemilu sehingga untuk mendapatkan suara terbanyak diperlukan kerjasama dengan beberapa partai politik.

Susunan kabinet di dalam koalisi berusaha menciptakan dan menampung aspirasi perwakilan yang mewadahi dalam beberapa partai politik atau beberapa aliran politik yang ada guna menjamin adanya pendukung politik yang realitas dalam pembentukan sebuah koalisi pemerintahan, sehingga dengan demikian pertimbangan politik menjadi factor penting atas dasar profesionalisme. Imbasnya di Negara Kesatuan Reublik Indonesia dengan penerapan sistem parlementer maka Kabinet koalisi yang dibentuk belum pernah bekerja secara sistematis dan berhasil. Percampuran sistem parlementer dan sistem persidensial kurang menguntungkan bagi kehidupan pemerintahan maupun kehidupan politik yang lebih terbuka dan demokratis untuk itu kabinet koalisi yang ada sekarang ini sebagai konsekuensi.

Pergantian dalam kabinet pemerintahan sistem persidensial yang di anut di Indonesia hak prerogratif berada pada tangan presiden dan merupakan hal yang biasa dan jarang menimbulkan kegoncangan politik, dikarenakan pengangkatan dan pemberhentian kabinet sepenuhnya. Kebalikan dalam sistem parlementer pengangkatan dan pemberhentian kabinet selalui didahului dengan lobi politik guna mencari dan memelihara dukungan politik. Apabila upaya lobyng gagal dan bisa menyebabkan jatuhnya kabinet. Menurut ketentuan Indonesia hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem persidensial, tetapi ketika pergantian anggota kabinet terjadi reaksi beberapa fraksi di DPR yang anggotanya mengalami pergantian kabinet.

Ketidakefektifan oposisi dalam pemerintah satu hal yang lemah dari sistem politik demokratis, ini terlihat bahwa pemerintah yang demokratis seharusnya mempunyai dan membentuk oposisi, ini berguna untuk mengkoreksi dan sebagai alternatif untuk memecahkan persoalan ketatanegaraan. Kalau kita perhatikan susunan kabinet dalam koalisi di Indonesia, kebanyakan mereka menghimpun kekuatan politik dalam rezim koalisinya, untuk itu sulit memunculkan koalisi yang efektif di suatu masyarakat (Kaisepo, 2001). Tetapi koalisi akan jadi positif apabila koalisi bertujuan sebagai cambuk tali yang pernah putus kembali menguat sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tepap tercipta dan tumbuh subur. Pelibatan pembentukan kabinet harus merekrut tokoh partai yang ada di Indonesia. Memang mereka banyak dari beberapa partai yang berbeda akan tetapi pendiriannya dengan presiden harus selalu membangun koalisi. Bukan penghalang keberadaan para petinggi partai dalam mewakili duduk di kabinet karena masing-masing mempunyai kepentingan partai yang berbeda-beda, untuk itu para petinggi partai kurang menyatukan dan mengerucut ke kepentingan nasional, sehingga yang mereka lakukan adalah memperhitungkan untung dan ruginya. Jadi ini menguntungkan beberapa pihak lain

dari mereka karena mereka akan melakukan kinerja kabinet yang tidak bisa maksimal karena sudah punya tujuan tersendiri dari partai tersebut.

Dalam sistem politik jika memang tidak mencapai kata mayoritas tunggal, maka jika ingin tercipta pemerintah yang baik haruslah berlaku sistem parlementer. Sehingga susunan kabinet bentukan presiden harus berkoalisi antar satu atau beberapa partai politik, dengan mencapai jumlah mayoritas. Tapi inipun harus dibarengi dengan menteri-menteri yang dikirim oleh partai politik seharusnya sungguh-sungguh punya kemampuan dan keahliannya harus menguasai, untuk itu dalam menjaga kualitas kabinet maka presiden tetap mempunyai hak prerogatif dalam penentuannya. Negara maju dalam berdemokrasi serta menggunakan system partai yang banyak, maka kabinet dibentuklah koalisi karena suara diperoleh sebagian dari para pemilih pada saat pemilu.

Indonesia menempatkan eksekutif tergantung kepada parlemen di dalam sistem demokrasi pemerintah. Sehingga Presiden untuk menyusun kabinet-kabinet hingga Presiden dapat berlindung dan mempunyai hak prerogatif, namun kenyataan politik ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan politik diparlemen. Ada akibat kabinet yang tidak mempunyai fungsi efektif dikarenakan menjamurnya koalisi yang membentuk kabinet. Memadukan dua tipe kabinet dalam koalisi ini adalah tipe kondisi Indonesia sungguh sulit, ini dikarenakan sistem pengkaderan di berbagai partai politik belum bisa memberikan jaminan bahwa tokoh yang diajukan berhasil adalah kader yang berkualitas baik. Untuk mengisi keanggotaan kabinet bukan jumlah departemen yang di porsikan, karena perlu di ingat peraturan perundang-undangan hanya memberikan kewenangan kepada presiden, pada sisi lain seyogyanya pemerintah dapat menyisakan partai politik, tentunya jangan sampai membahayakan kabinet pemerintahan. Ini penting untuk dapat melaksanakan fungsi oposisi, karena apabila semua dirangkul dalam kabinet akan dapat mematikan benih-benih demokrasi.

Susunan Politik yang ada di Indonesia terdiri dari banyak partai apalagi tidak ada yang mayoritas menjadi kendala pada penyusunan kabinet dan stabilitas dilingkungan eksekutif, kemudian kabinet yang dibentuk sangat tergantung pada kompromi serta koalisi dari partai yang ada. Tujuan Kabinet sebenarnya dibentuk berdasarkan sistem kompromi dengan tujuan mencapai rekonsiliasi nasional usai konflik politik yang berkelanjutan. Ini muncul dan masuknya partai besar pada kabinet menimbulkan persoalan. Partai di tuntutan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah yang demokratis.

Menurut Philip Smith (2000) mengkritik dalam perspektif yang dimana melihat karisma semata-mata sebagai bagian dari produk struktur sosial kemudian berlaku

serta hasil dari *personality traits* yang membebek pada seseorang pemimpin. Lebih lanjut Smith, mengatakan bahwa karisma yaitu ikatan moral yang berkaitan atau terkait para pengikut dan pemimpin mereka. Ikatan moral inilah sering tidak dipahami secara mikro, sebagai implikasi dari kepribadian dan interaksi dari kelompok, tetapi secara kultural, sebagai produk dari struktur-struktur simbolis, atau dengan kata lain, sebagai sentimen kolektif yang dibentuk oleh tindakan, kekuasaan, serta moralitas dari seorang pemimpin.

Parlemen dalam realitanya tersusun dari perpaduan partai politik yang mempunyai kedudukan di dalam struktur kabinet serta kabinet bersifat mengakomodasi keinginan sehingga kontrol kepada pemerintah menjadi sulit terkontrol. Situasi politik seperti ini mengkerdilkan bagi tumbuh kembangnya demokrasi. Tumbuh dan berkembangnya kabinet seharusnya gabungan secara etika dan moral partai-partai itu harus mendukung kabinet dan tidak boleh beroposisi. Harapannya koalisi yang terbentuk dalam hal ini pemerintah akan menjadi stabil dan kuat. Anggota DPR biasanya tidak respon karena pemerintah tersebut tersusun dari partai yang memang sama. Jadi jika koalisi ada posisi pemerintahan menjadi kuat, akan tetapi partai rakyat pada posisi lemah.

Sistem presidensial ada yang berpendapat tidak mungkin ada pemerintahan koalisi tetapi pemerintah koalisi biasanya terjadi pada sistem pemerintahan parlementer. Tatanan pada sistem pemerintahan presidensial bahwa para menteri merupakan anggota kabinet, tidak terpaku kepada latar belakang politik anggota kabinet tersebut. Akhirnya keberadaan anggota kabinet di susun dan terfokus kepada apa kehendak pada presiden hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan presiden mempunyai hak untuk memberhentikan. Tapi tercerminnya kebijaksanaan presiden, dapat dilihat melalui perekrutan menteri dari berbagai jenis kekuatan yang ada di parlemen tetapi dari segi yang lain presiden yang disini sebagai kepala Negara harus piyawai menyusun kabinet yang terdiri dari tokoh masyarakat yang jujur dan juga profesional.

Berjalan atau tidak pada pemerintah tergantung kepada dukungan sebagian besar parlemen. Tetapi pada sisi lain koalisi akan mudah dapat ancaman serta perpecahan disebabkan cita-cita dan cara melaksanakan gagasan politik serta perbedaan gagasan politik yang mendasar, (Manan, 2003). Pendapat Kevin dan Beetham (2000) mengatakan bahwa demokrasi lebih menekankan adanya debat terbuka saling mempengaruhi dan bekerjasama, serta demokrasi tidak melulu ditafsirkan meski ada perbedaan beberapa pendapat dan beberapa kepentingan, tapi ini menghendaki supaya perbedaan disampaikan.

Realita pemilihan umum 2004 menunjukkan bahwa koalisi partai politik merupakan suatu keniscayaan saja, tentu koalisi harus tetap memperhatikan beberapa etika demokrasi. Misalnya dalam hal ini koalisi pengisian jabatan presiden akan diambil dari partai yang memperoleh suara yang lebih besar pada pemilihan umum legislative dan yang lebih kecil menduduki jabatan wakil presiden. Hal ini memotivasi pada tiap partai politik berusaha agar berkoalisi dengan partai lain yang memperoleh dukungan yang cukup signifikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Koalisi ini akan mengusahakan menjalin dan menempatkan posisi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan dukungan politik, dengan begitu diharapkan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif.

Oposisi yang loyal dalam etika politik atau yang beradab dan seimbang yaitu bentuk oposisi yang dalam hal ini oposisi tidak hanya mengembangkan sikap apriori, mencari-cari kesalahan dan mencari musuh. Posisi oposisi loyal diparlemen akan menentang pemerintah jika kebijakannya merugikan rakyat begitupun hal tersebut akan berbalik mendukung kebijakan pemerintah bila kebijakan itu memang baik dan bermanfaat bagi rakyat. Sebagai kekuatan penyeimbang oposisi sangat loyal memiliki peranan yang penting dalam menjaga dinamika politik nasional, ini bertujuan agar pemerintahan tidak tergelincir pada korupsi, kolusi dan nepotisme serta otoritarisme.

Simpulan

Simpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah yang dikatakan demokrasi adalah suatu proses pemerintahan menuju menjadi lebih baik, pemerintah demokrasi di Indonesia tidak pernah akan final, akan tetapi demokrasi selalu akan berkembang pada beberapa tahapan untuk menuju dan mendekati demokrasi yang dikatakan demokrasi sempurna pada sebuah bangsa; (2) Gambaran dan gagasan tentang politik demokrasi, ini berperan penting, yaitu peran oposisi adalah pemegang kekuasaan. Demokrasi oposisi dapat memainkan perannya untuk mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah, sehingga demokrasi oposisi berbeda pendapat dengan pemerintah. Untuk mengajukan alternatif kebijakan bahkan sampai pada upaya mengganti pemerintahan ini adalah bisa saja wilayah oposisi; (3) Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem beberapa partai politik kemungkinan tidak mendapat dukungan suara yang banyak di parlemen, sehingga perlu membina kerjasama dengan dukungan koalisi partai lain agar pemerintah dapat menjalankan tugas dan peranannya secara efektif dan memperoleh legitimasi yang sesuai dengan undang-undang; dan (4) Realita politik serta wacana akademik akan berkembang dalam dinamika sistem demokrasi untuk itu sulit memilih

antara koalisi dan oposisi, sehingga dalam demokrasi akan selalu ditemui adanya koalisi dan oposisi sesuai dengan dinamika perpolitikan hingga akan berjalan baik pada sebuah negara.

Daftar Pustaka

- Bambang, C. (1999). *Kontribusi Umat Islam dalam Sistem Politik Indonesia Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beetham, D., & Boyle, C. K. (2009). *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Denny, J.A. (2001, Maret 27). Politik Setelah Memorendum. Retrived from Kompas.
- Kaisepo, M. (2001, May 25). Dilema dan Kesulitan Kabinet Koalisi dari Politisi Birokrasi Hingga Oposisi Setengah Hati. Retrived from Kompas.
- Kusumah, W. M. (1999, December 8). Lembaga-lembaga di Luar Kabinet dan Prospek Oposisi. Retrived from Kompas.
- Mahasin, A. (2000). *Menyemai Kultur Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UUI Press.
- Muhammad. (1999, August 5). Oposisi Menuju Demokrasi. Retrived from Kompas.
- Saefullah, D. (1999). *Konsep dan Metode Pemberian Pelayanan Umum yang Baik*. FISIP Unpad.
- Siregar, A. (2003). *Politik editorial media Indonesia: analisis tajuk rencana 1998-2001*. Jakarta: LP3ES.
- Smith, P. (2000). Culture and charisma: outline of a theory. *Acta Sociologica*, 43(2), 101-111.
- Uhdin, A. (1998). Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia. Bandung: Mizan.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Majid*. Jakarta: Penerbit Republika
- Zainuddin, M. (2001). *Politik Indonesia Kontemporer, Prospek Gerakan Oposisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.